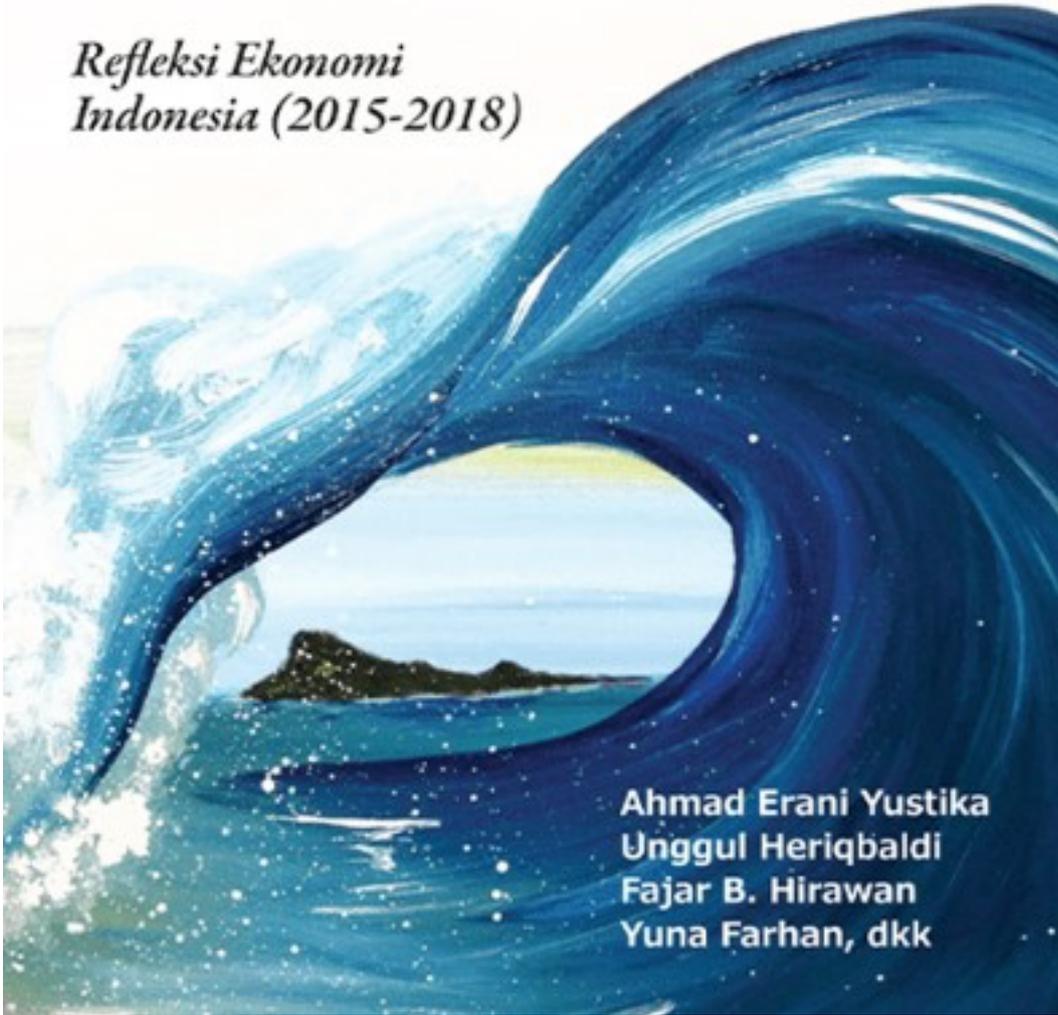




BERSELANCAR DI ATAS OMBAK

*Refleksi Ekonomi
Indonesia (2015-2018)*



Ahmad Erani Yustika
Unggul Heriqbaldi
Fajar B. Hirawan
Yuna Farhan, dkk

Daftar Isi

<i>PENGANTAR: Berselancar di Atas Ombak</i>	4
<i>BAB I. Kualitas Pembangunan dan Agenda Kemajuan Ekonomi</i>	10
Pendahuluan.....	10
Kualitas Pertumbuhan.....	11
Lima Pilar Ekonomi.....	14
Pendalaman Pembangunan.....	18
Penutup.....	22
Daftar Pustaka.....	23
<i>BAB II. Belajar dari Rupiah</i>	24
Pendahuluan.....	24
Nilai Tukar dan Neraca Transaksi Berjalan.....	24
Nilai tukar dan APBN.....	30
Respons Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK.....	32
Penutup.....	36
Daftar Pustaka.....	37
<i>BAB III. Ikhtiar Penyelamatan Neraca Transaksi Berjalan: Pendekatan Neraca Barang Dan Jasa</i>	39
Pendahuluan.....	39
Sekilas Tentang Neraca Transaksi Berjalan.....	40
Perkembangan Neraca Transaksi Berjalan.....	41
Tantangan Mendorong Kinerja Perdagangan Barang dan Jasa.....	44
Siasat Atasi Defisit Transaksi Berjalan.....	47
Daftar Pustaka.....	48
<i>BAB IV. Menggerakkan Ekonomi Melalui Investasi</i>	50
Pendahuluan.....	50
Perbaikan Iklim Investasi.....	50
Realisasi Investasi.....	51
Investasi Industri 4.0.....	54
Reformasi Regulasi Investasi.....	55
Langkah Kedepan.....	56
Daftar Pustaka.....	57
<i>BAB V. Memacu Peran Sektor Keuangan di Indonesia</i>	58
Pendahuluan.....	58
Penyebab Dangkalnya Pasar Keuangan Indonesia.....	60
Langkah ke Depan.....	66

Daftar Pustaka.....	67
<i>BAB VI. Bantuan Sosial Mengurai Kemiskinan.....</i>	<i>69</i>
Pendahuluan.....	69
Mengetahui Bantuan Sosial.....	70
Alokasi Anggaran.....	71
Dampak terhadap Kemiskinan.....	72
Daftar Pustaka.....	74
<i>BAB VII. Dana Desa Untuk Indonesia Maju</i>	<i>76</i>
Pendahuluan.....	76
Strategi Pembangunan Desa melalui Dana Desa.....	76
Tantangan Pembangunan Desa.....	80
Daftar Pustaka.....	82
<i>BAB VIII. Tantangan Pembenahan BPJS Kesehatan</i>	<i>83</i>
Pendahuluan.....	83
Aneka Masalah BPJS Kesehatan	84
Solusi dan Pajak Dosa.....	85
Daftar Pustaka.....	88
<i>BAB IX. Menghidupkan Gairah Industri Ekonomi Kreatif di Indonesia</i>	<i>89</i>
Pendahuluan.....	89
Kilas Balik Ekonomi Kreatif	90
Komersialisasi Kreativitas	93
Tantangan Ekonomi Kreatif di Era Digital.....	96
Daftar Pustaka.....	97
<i>BAB X. Mengawal Potensi UMKM di Era Revolusi Industri 4.0</i>	<i>98</i>
Pendahuluan.....	98
Perkembangan UMKM di Indonesia	99
Digitalisasi Sektor UMKM.....	101
Arah Pengembangan Sektor UMKM Ke Depan	103
Daftar Pustaka.....	105
<i>BAB XI. Peluang Pasar Asia Pasifik di Era Digital</i>	<i>106</i>
Pendahuluan.....	106
Optimisme di Tengah Guncangan.....	107
Membaca Peluang di Era Digital.....	108
Tantangan ke depan	113
<i>BAB XII. Memprioritaskan Pariwisata</i>	<i>115</i>
Pendahuluan.....	115
Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH).....	116

Pariwisata dan Ekonomi Indonesia	118
Tantangan ke Depan	121
Penutup	122
<i>BAB XIII. Menakar Arab Politik Anggaran Nawacita</i>	<i>125</i>
Pendahuluan	125
Politik Anggaran <i>Incremental</i>	126
Transformasi Pendekatan Politik Anggaran.....	128
Tantangan Politik Anggaran Ke Depan.....	131
Daftar Pustaka.....	133
<i>BAB XIV. Ikhtiar Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel.....</i>	<i>134</i>
Pendahuluan.....	134
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Perdana	135
Sebuah Ikhtiar	138
Daftar Pustaka.....	142
<i>PENUTUP: Kesejahteraan Yang Berkeadilan.....</i>	<i>143</i>
<i>KONTRIBUTOR.....</i>	<i>147</i>

BAB II. BELAJAR DARI RUPIAH

Oleh: Unggul Heriqbaldi

Pendahuluan

Hingga 19 Desember 2018, kurs Rupiah terhadap Dolar AS di pasar *spot* mencapai Rp14.439, atau sejak awal tahun rupiah telah mengalami pelemahan 6,96 persen. Di ekstrem paling negatif terdapat Peso Argentina dan Lira Turki yang mengalami pelemahan masing-masing hingga 106,02 persen dan 39,45 persen. Namun pada saat yang sama Baht Thailand hanya mengalami pelemahan 0,57 persen.

Para pemerhati ekonomi memperdebatkan penyebab terjadinya pelemahan rupiah dan sampai kapan pelemahan ini akan terjadi. Sebagian yang lain berdiskusi tentang strategi untuk menghindari pelemahan nilai tukar yang semakin dalam dan mencoba menjawab berbagai tantangan manajemen makro ekonomi ke depan terutama di *emerging market*. Di balik diskusi tersebut, di akhir 2018 merupakan salah satu momen terbaik untuk menarik beberapa pelajaran penting dari peristiwa atau episode pelemahan rupiah sepanjang 2018.

Nilai Tukar dan Neraca Transaksi Berjalan

Peristiwa naik turunnya nilai tukar rupiah tidak dapat dilepaskan dari kinerja neraca transaksi berjalan (*current account*). Neraca transaksi berjalan adalah salah satu komponen pembentuk neraca pembayaran selain neraca transaksi modal dan finansial. Neraca transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan barang dan jasa serta neraca pendapatan primer dan sekunder. Neraca transaksi berjalan ini sering diidentikkan dengan perubahan dalam *net foreign asset*, yang artinya jika suatu negara mengalami defisit dalam neraca ini maka negara tersebut harus membiayainya dengan mengurangi cadangan devisanya atau membiayai dengan aliran modal dari luar negeri yang masuk

ke dalam negeri. Oleh karena itu, defisit neraca transaksi berjalan secara teoritis akan menekan nilai tukar mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing.

Neraca transaksi berjalan yang defisit menimbulkan konsekuensi melemahnya rupiah. Semakin tinggi permintaan dolar AS di dalam negeri untuk kepentingan impor barang dan jasa, pembayaran utang luar negeri, serta pembayaran imbal hasil investasi asing langsung dan portofolio maka akan semakin tinggi pula tekanan bagi rupiah untuk melemah.

Bagi Indonesia, meskipun defisit neraca transaksi berjalan mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir (2015-2017), namun 7 tahun defisit secara berturut-turut menyebabkan tekanan terhadap rupiah semakin tidak dapat dihindari (Gambar 2.1(b)). Ini artinya depresiasi merupakan konsekuensi alamiah dari adanya defisit neraca transaksi berjalan.



(a)

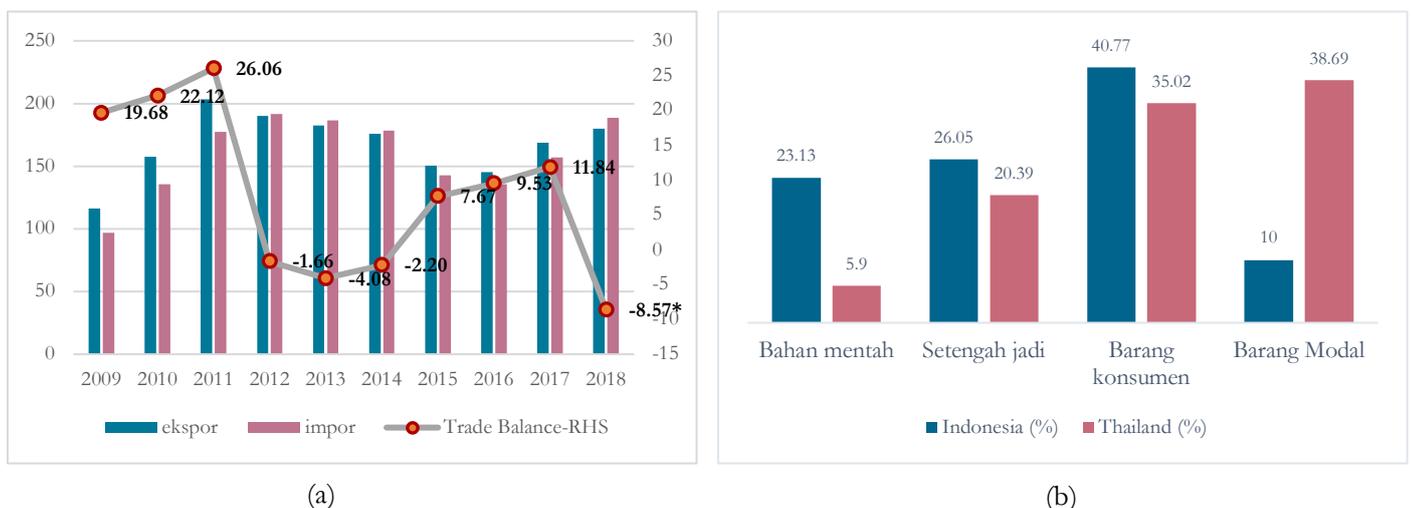
(b)

* Angka sementara
sumber: Bank Indonesia (2018)

Gambar 2.1. (a) Rasio Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB (%) dan (b) Defisit Neraca Transaksi Berjalan Indonesia (USD milyar)

Hal yang harus dicermati kemudian adalah jangan sampai depresiasi melebihi cerminan fundamental ekonomi. Oleh karena itu, respons kebijakan ekonomi dalam jangka pendek dan persepsi pasar menjadi sangat krusial dalam menjaga rupiah agar berada di level yang aman.

Jika ditelaah lebih jauh, defisit neraca transaksi berjalan di antaranya disebabkan oleh pertumbuhan dan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan dan nilai impor sehingga surplus neraca perdagangan terus menipis bahkan menjadi defisit. Sejak 2012 hingga 2016 penerimaan ekspor Indonesia terus menurun karena harga komoditas dunia mengalami penurunan. Dengan membaiknya harga komoditas sejak 2016, ekspor Indonesia mulai meningkat di 2017 dan 2018 (Gambar 2.2). Namun demikian sebagai perbandingan, kinerja ekspor tahun 2018 belum bisa menyamai level ekspor di tahun 2011. Fluktuasi penerimaan ekspor ini menunjukkan bagaimana ekonomi Indonesia masih terlalu tergantung pada komoditas (*commodity-based economy*) termasuk dalam ekspor. Perbandingan komposisi produk ekspor antara Indonesia dan Thailand memperlihatkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi sektor dengan nilai tambah yang rendah (49 persen) sedangkan ekspor Thailand didominasi oleh produk dengan nilai tambah yang tinggi (74 persen) (Gambar 2.2(b)).



* Angka sementara

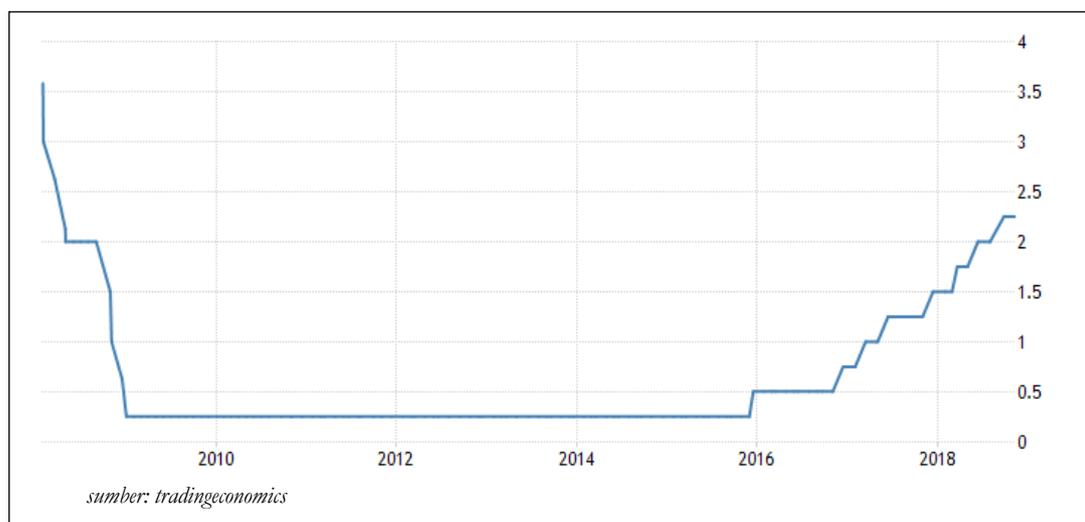
sumber: BPS & Bank Dunia (2018)

Gambar 2.2. (a) Ekspor dan Impor Indonesia (USD milyar) dan (b) Komposisi Ekspor Indonesia dan Thailand (USD milyar)

Pertanyaannya mengapa defisit transaksi berjalan yang sudah terjadi selama 7 tahun namun baru menyebabkan pelemahan rupiah di 2018. Jawabannya adalah karena selama waktu tersebut Indonesia menikmati tingginya arus modal masuk setiap tahun melalui investasi portofolio dan

investasi langsung, sehingga menjadi tambahan pasokan dolar yang diperlukan oleh Indonesia untuk membiayai impor barang dan jasa, pembayaran utang luar negeri dan pembayaran lainnya.

Derasnya arus modal asing masuk sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menetapkan tingkat bunga acuannya efektif di nol persen sebagai respons terhadap resesi ekonomi akibat krisis 2008. Kebijakan tingkat bunga nol persen ini berlangsung dari 2009 hingga akhir 2015 (Gambar 2.3). Kebijakan ini membuat modal dari Amerika Serikat keluar cukup deras untuk mencari *yield* di *emerging market* termasuk Indonesia.

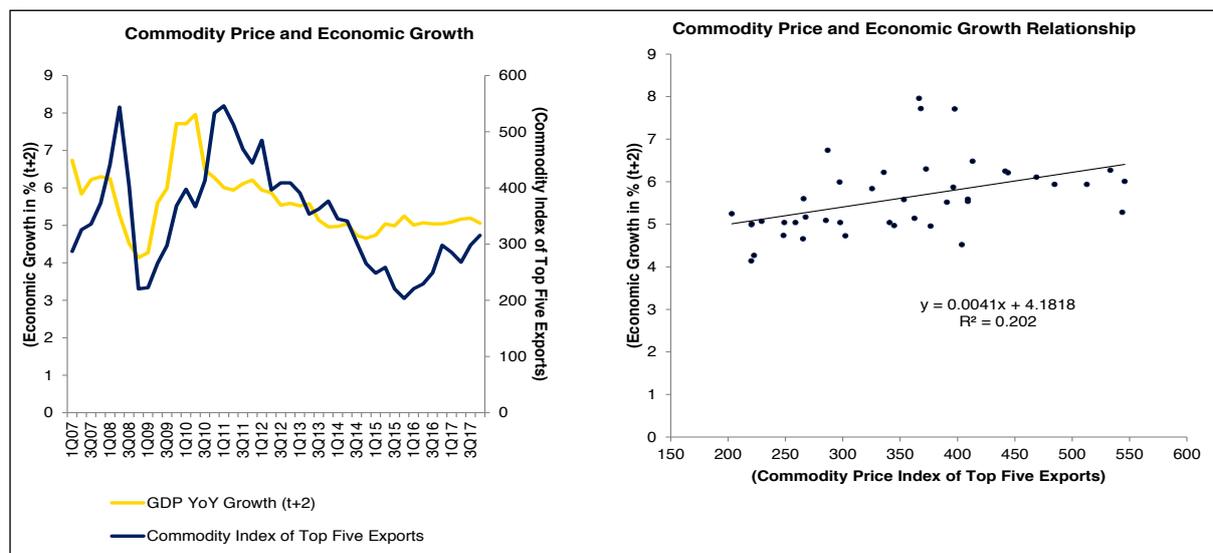


Gambar 2.3. Tren Suku Bunga Acuan AS (%)

Namun “keberuntungan” ini tidak dapat berlangsung lama karena ketika kinerja ekonomi AS mulai stabil di 2016, Federal Reserve Amerika Serikat mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga acuannya, sehingga modal yang banyak tersimpan di *emerging market* seperti Indonesia bergerak kembali ke Amerika Serikat untuk *search for yield*. *Supply* dolar di dalam negeri akhirnya menjadi semakin kecil sehingga dolar menjadi semakin mahal di mata rupiah. Hal ini yang menjelaskan mengapa rupiah selama tahun 2018 mengalami tekanan depresiasi hingga 6,96 persen.

Permasalahan di atas tidak akan terjadi jika Indonesia memiliki neraca perdagangan yang sehat, yaitu surplus secara berkelanjutan. Surplus neraca perdagangan dapat menjamin kebutuhan

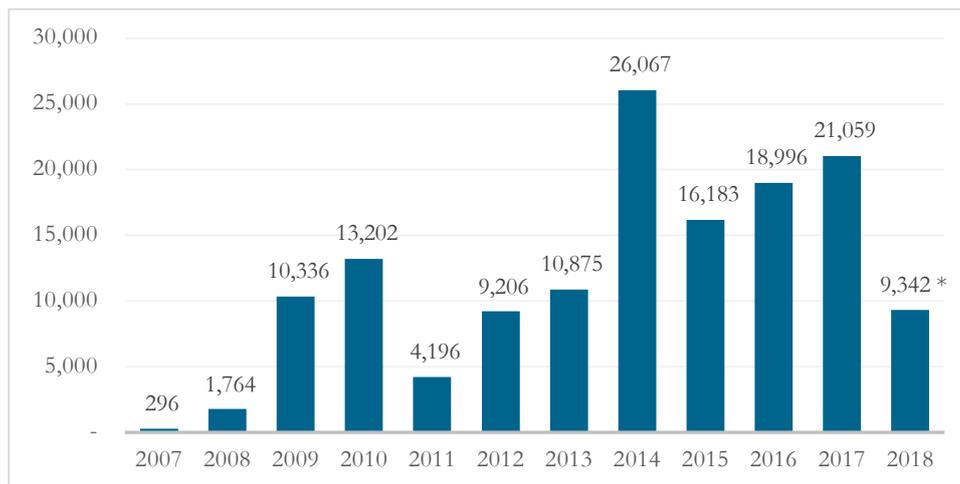
pasokan dolar dalam negeri selalu terjaga baik, sehingga terhindar dari problem volatilitas tinggi dalam nilai tukar. Surplus yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika struktur ekspor dibangun oleh produk dari industri manufaktur dengan nilai tambah yang tinggi. Namun demikian Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas yang harganya sangat fluktuatif di pasar internasional. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi juga tergantung pada ekspor komoditas (Gambar 2.4).



sumber: Gunawan (2018)

Gambar 2.4. Ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Harga Komoditas

Problem pelemahan rupiah juga tidak akan terjadi jika Indonesia tidak terlalu tergantung pada arus modal asing yang masuk dan bersifat jangka pendek. Meskipun kategori modal ini juga meningkatkan pasokan dolar namun sifatnya yang jangka pendek memberikan risiko yang tidak kecil bagi nilai tukar karena mudah sekali untuk mengalir ke negara lain untuk mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Pada 2007 aliran modal masuk ke Indonesia dalam bentuk portofolio masih sekitar 296 juta dolar AS, dengan kebijakan suku bunga efektif nol persen oleh bank sentral AS di 2009, telah mendorong aliran modal dari negara maju termasuk AS ke *emerging market* seperti Indonesia, sehingga di 2014 aliran modal masuk ke Indonesia dalam bentuk portofolio mencapai puncaknya yaitu 26 milyar dolar AS (Gambar 2.5).



* Angka sangat sementara
sumber: Bank Indonesia (2018)

Gambar 2.5. Aliran Masuk Modal Portofolio ke Indonesia (dalam juta USD)

Faktanya, arus modal jangka pendek pada akhirnya mengalir dengan deras dari Indonesia akibat kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS terutama di 2018. Ini artinya, selama Indonesia menggantungkan diri pada *capital inflow* jangka pendek untuk membiayai defisit neraca perdagangan, maka Indonesia harus terbiasa dengan volatilitas rupiah yang tinggi akibat *capital outflow* sebagai konsekuensi dari perubahan ekonomi global atau perubahan dalam kebijakan ekonomi negara lain terutama AS. Volatilitas nilai tukar pada dasarnya bukan permasalahan yang serius jika terjadi hanya pada rentang yang sehat di antara nilai jangka panjangnya. Volatilitas menjadi bermasalah ketika bergerak semakin menjauhi nilai jangka panjangnya (*overshoot*).

Dalam kasus Indonesia, meskipun masalah nilai tukar ini adalah problem ekonomi jangka pendek, namun penyelesaiannya justru ada di isu ekonomi jangka panjang, yaitu struktur industri yang sehat, kompetitif dan berorientasi ekspor serta meningkatkan *foreign direct investment* (FDI). Oleh karena itu, pemerintah perlu bergerak secara aktif melalui instrumen fiskalnya dan reformasi struktural untuk mendorong ekspor produk manufaktur dan investasi asing langsung sehingga diversifikasi ekspor bisa terjadi dan fluktuasi penerimaan dari ekspor dapat dikurangi.

Insentif lain harus diberikan untuk investor dalam dan luar negeri yang memproduksi untuk kepentingan ekspor. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan pendapatan yang terus meningkat,

Indonesia memang menjadi daya tarik sendiri sebagai pasar. Namun dengan memberikan insentif bagi investasi berorientasi ekspor, perekonomian akan memperoleh manfaat lebih besar seperti efisiensi karena pasar luar negeri yang besar, penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas hingga menghasilkan devisa ekspor. Dari sisi impor, selama bertahun-tahun komposisi terbesar impor Indonesia adalah bahan baku dan penolong. Penting bagi pemerintah untuk mendorong investasi di industri hulu melalui skema kebijakan fiskal seperti *tax holiday* dan skema lainnya.

Nilai tukar dan APBN

Secara teoritis, hubungan antara nilai tukar dan kebijakan makro ekonomi digambarkan oleh model krisis nilai tukar generasi pertama dan kedua. Model krisis generasi pertama memandang bahwa krisis nilai tukar terjadi sebagai konsekuensi dari inkonsistensi *macroeconomic policy stance* terkait dengan kebijakan nilai tukar yang dianut oleh suatu negara [lihat misalnya: Agenor, Bhandari, & Flood (1992); Feridun (2009); Ford, Santoso, & Horsewood (2007); Heriqbaldi, Ismail, Kaluge, & Santoso (2014); Krugman (1979); Sachs, Tornell, & Velasco (1996)]. Sebagai contoh, langkah pemerintah untuk meningkatkan belanja di tengah upaya memelihara nilai tukar pada level tertentu merupakan bentuk inkonsistensi dalam kebijakan makro ekonomi.

Model generasi kedua menyatakan bahwa serangan spekulatif dapat tumbuh menjadi krisis, bahkan dalam kasus di mana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal konsisten dengan rezim nilai tukar (Heriqbaldi et al., 2014). Model ini memandang bahwa “godaan” bagi pemerintah untuk meninggalkan rezim nilai tukar dapat menciptakan ekspektasi negatif di pasar. Kondisi seperti itu, kemudian, memperkuat ekspektasi pelaku ekonomi di pasar, yang pada gilirannya menciptakan *multiple equilibria* dalam ekonomi. Oleh karena itu, jika ada kecenderungan *overvaluation* atau *undervaluation* dalam nilai tukar, maka dapat menciptakan ekspektasi negatif, yang pada gilirannya dapat memicu krisis nilai tukar.

Pengalaman krisis nilai tukar di Indonesia pada 1998 memperlihatkan kompleksitas masalah ekonomi seolah satu model atau teori krisis nilai tukar tidak mencukupi untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan rupiah saat itu. Namun beberapa hal yang dapat dilihat pada 1998 tersebut di antaranya: (1) krisis diawali dengan adanya *misalignment* rupiah dari nilai jangka panjangnya (Heriqbaldi, Widodo & Ekowati, 2018); dan (2) krisis terjadi tidak hanya karena *fundamental driving factors* namun juga *belief-driven multiple equilibria* atau gabungan beberapa faktor seperti diperlihatkan teori krisis generasi pertama, kedua dan ketiga (Heriqbaldi et al., 2014).

Pelajaran yang dapat diambil dari krisis nilai tukar 1998 adalah konsistensi kebijakan makro ekonomi. Pada saat itu, nilai tukar dijaga pada level tertentu yang cenderung *overvalued*, namun pada saat yang sama, kredit domestik yang menjadi bagian dari uang beredar ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan tingkat kekerjaan (*employment*). Kedua kebijakan ini bertolak belakang sehingga menjadi pemicu terjadinya tekanan pelemahan rupiah.

Kebijakan makro ekonomi juga mencakup kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN. Konsistensi kebijakan fiskal dalam menjaga nilai tukar sangat penting. Ketika bank sentral mencoba menjaga nilai tukar pada levelnya, namun jika pemerintah terus meningkatkan pinjaman domestik untuk membiayai APBN yang defisit dalam rangka mencapai tujuan ekonomi domestik seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kekerjaan, maka terjadi inkonsistensi dalam kebijakan makro ekonomi. Inkonsistensi ini kemudian mendorong munculnya serangan spekulatif pada mata uang domestik, yang sewaktu-waktu dapat tereskalasi menjadi krisis nilai tukar [lihat misalnya: Ford et al. (2007); Sachs et al., (1996)].

Ini berarti menjaga APBN untuk tetap konsisten dengan kebijakan moneter dan keseimbangan nilai tukar menjadi faktor penting dalam menghindari tekanan pada nilai tukar rupiah. Aspek ini sering disebut sebagai faktor fundamental penyebab krisis nilai tukar. Perekonomian bisa masuk dalam krisis yang lebih dalam ketika faktor lain turut serta dalam kompleksitas ekonomi yaitu serangan spekulatif akibat adanya persepsi pasar tentang *overvaluation* atau *misalignment* nilai tukar

dan pada saat terjadi permasalahan di sektor perbankan seperti terjadi pada krisis 1998. Pengelolaan APBN harus disiplin dan terjamin keberlanjutannya, sehingga tidak memberikan sinyal negatif pada pasar. Kedisiplinan dan keberlanjutan dalam APBN menjadi sangat kritical diperlukan ketika tekanan pada rupiah mulai terjadi untuk menghindari serangan spekulatif.

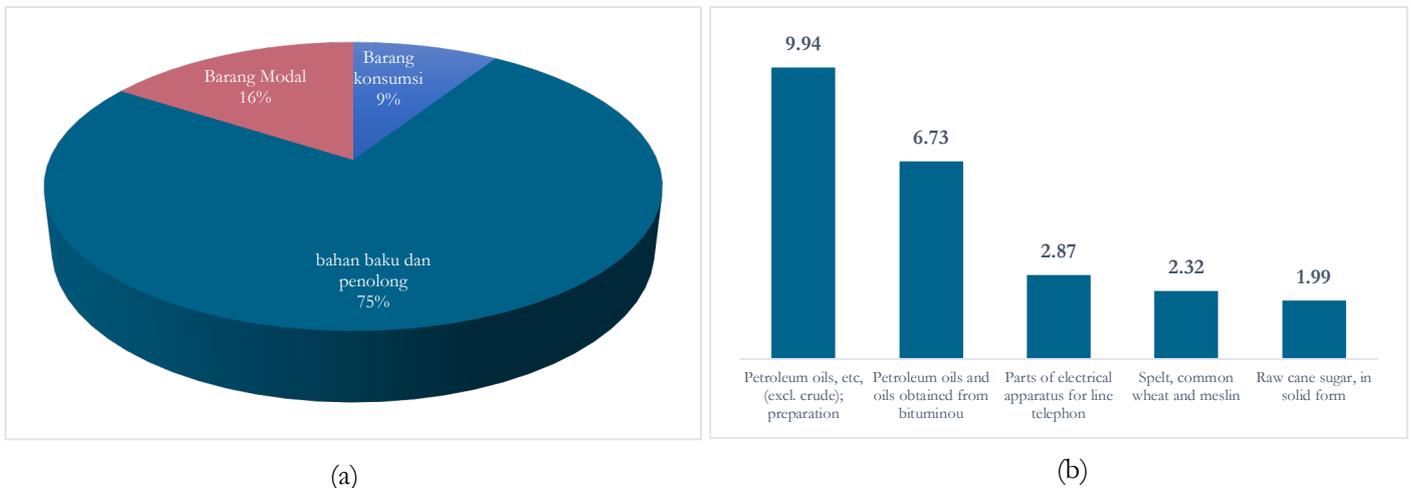
Kesehatan sektor perbankan juga sangat penting dijaga untuk mencegah berlanjutnya krisis nilai tukar menjadi krisis finansial. Dalam keadaan nilai tukar melemah dan menimbulkan potensi *bank-run*, maka sektor perbankan akan berhadapan dengan masalah likuiditas (Chui, 2003). Dalam keadaan permasalahan likuiditas perbankan seperti ini, maka instrumen *government guarantee* pun akan sangat rentan menimbulkan masalah fundamental seperti diperlihatkan pada teori krisis generasi pertama yaitu krisis akibat inkonsistensi kebijakan makro ekonomi dengan upaya menjaga nilai tukar pada level jangka panjangnya (Burnside, Eichenbaum, & Rebelo, 2001).

Respons Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK

Dari sudut pandang mazhab ekonomi, pemerintah Jokowi-JK sangat mengedepankan kebijakan sisi *supply*. Kebijakan sisi *supply* merujuk pada kebijakan mikro ekonomi yang ditujukan pada peningkatan efisiensi industri dan pasar sehingga berkontribusi pada peningkatan *output* perekonomian melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Hal ini sebetulnya selaras dengan jawaban atas tantangan defisit transaksi berjalan yang dihadapi Indonesia.

Profil perdagangan Indonesia memperlihatkan bahwa lebih dari 75% impornya didominasi oleh bahan mentah, setengah jadi dan barang modal (Gambar 2.6 (a)). Ketergantungan pada impor jenis barang ini sudah berlangsung lama dan menjadi karakteristik industri manufaktur Indonesia. Pengembangan sektor hulu yang berbasiskan keunggulan komparatif harus didorong melalui kebijakan pemerintah. Dengan cara ini Indonesia bisa mengurangi impor yang bersumber dari industri hulu dan pada akhirnya dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Merespons keadaan tersebut, kebijakan *tax holiday* untuk investor di sektor hulu seperti industri logam, kimia,

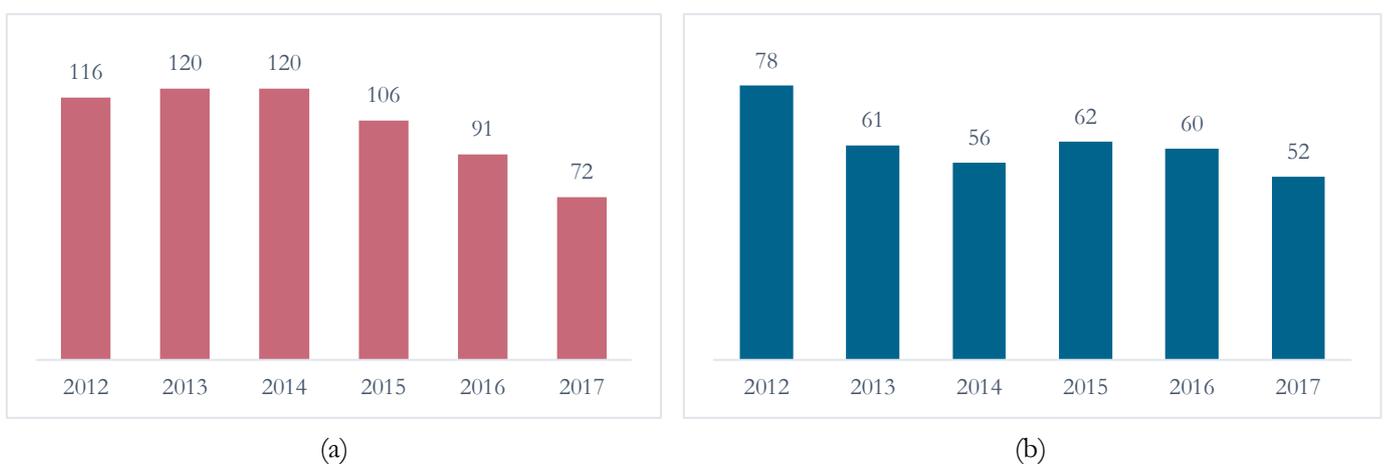
farmasi dan petrokimia berbasis gasifikasi batu bara (PMK No. 35 tahun 2018) digulirkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.



sumber: *World Integrated Trade Solution (2018)*

Gambar 2.6. (a) Komposisi Impor Indonesia, 2016 (%) dan (b) 5 Produk dengan Ekspor Tertinggi, 2016 (USD juta)

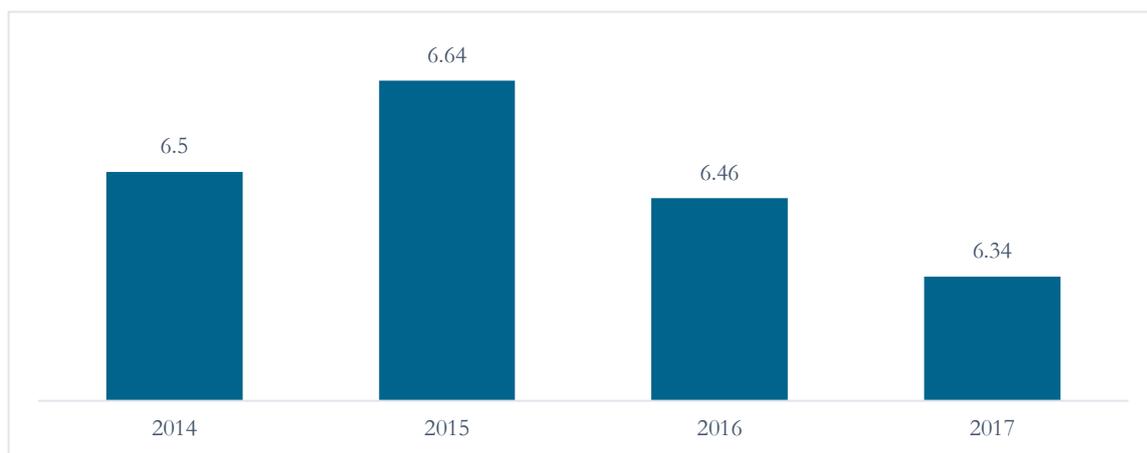
Kebijakan sisi *supply* ekonomi juga diterapkan melalui perbaikan iklim usaha dan investasi di bidang infrastruktur. Hasilnya tampak dalam jangka pendek seperti perbaikan signifikan dalam produktivitas ditunjukkan oleh *incremental capital output ratio* (ICOR) yang menurun maupun diperlihatkan melalui peningkatan peringkat kemudahan berusaha dari 120 (2014) menjadi 72 (2017) (Gambar 2.7 (a)). Peningkatan juga terjadi pada peringkat daya saing infrastruktur dari 78 (2012) menjadi 52 (2017) (Gambar 2.7(b)).



sumber: *Bank Dunia (2018)*

Gambar 2.7. (a) Peringkat EoDB Indonesia dan (b) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, beberapa hasil sudah mulai dirasakan seperti konektivitas yang meningkat karena jumlah jalan, jembatan, jalur kereta api, bandar udara hingga pelabuhan bertambah signifikan. Infrastruktur energi dan telekomunikasi juga meningkat tajam selama 4 tahun terakhir. Di sektor pertanian, pembangunan bendungan, irigasi dan embung dilakukan secara masif untuk melayani jutaan hektar lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan.



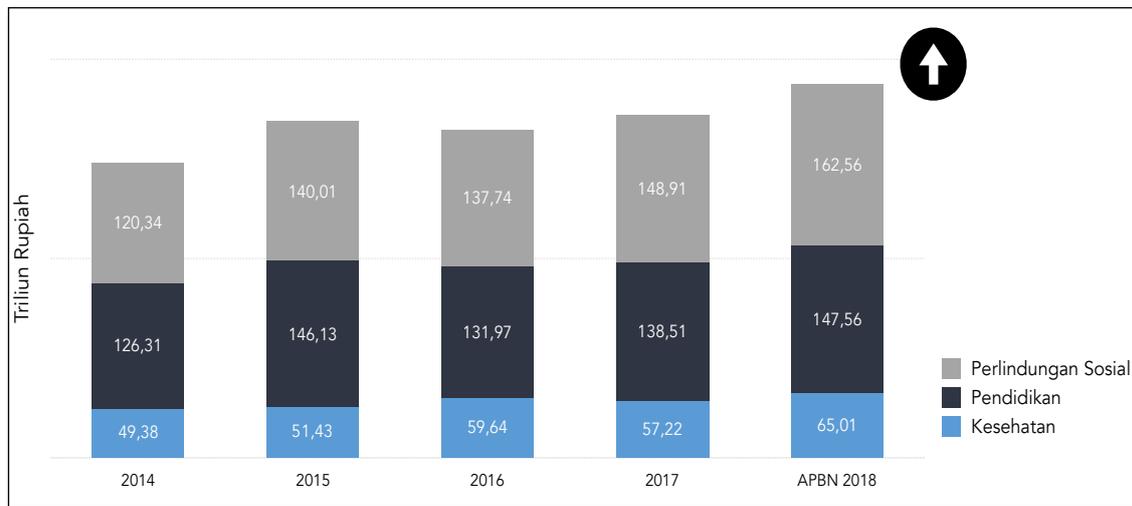
sumber: BPS (2018)

Gambar 2.8. Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri manufaktur, pemerintah juga mengembangkan 13 kawasan industri baru yang sebagian besar tersebar di luar Pulau Jawa. Reformasi struktural dilakukan dengan menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi hingga akhir 2018. Paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi dan menyelaraskan peraturan terkait industri. Di samping itu, paket kebijakan juga berupaya meningkatkan kepastian usaha dan kepastian hukum serta meningkatkan aksesibilitas UMKM pada permodalan yang kompetitif.

Aspek penting lain yang sangat berpengaruh pada reformasi struktural adalah peningkatan kualitas SDM. Peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja (Gambar 2.9). Hasilnya terlihat pada berkurangnya prevalensi *stunting* bayi di bawah 5 tahun (balita) dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018). Pada bidang pendidikan, jumlah pelatihan, pemagangan di industri

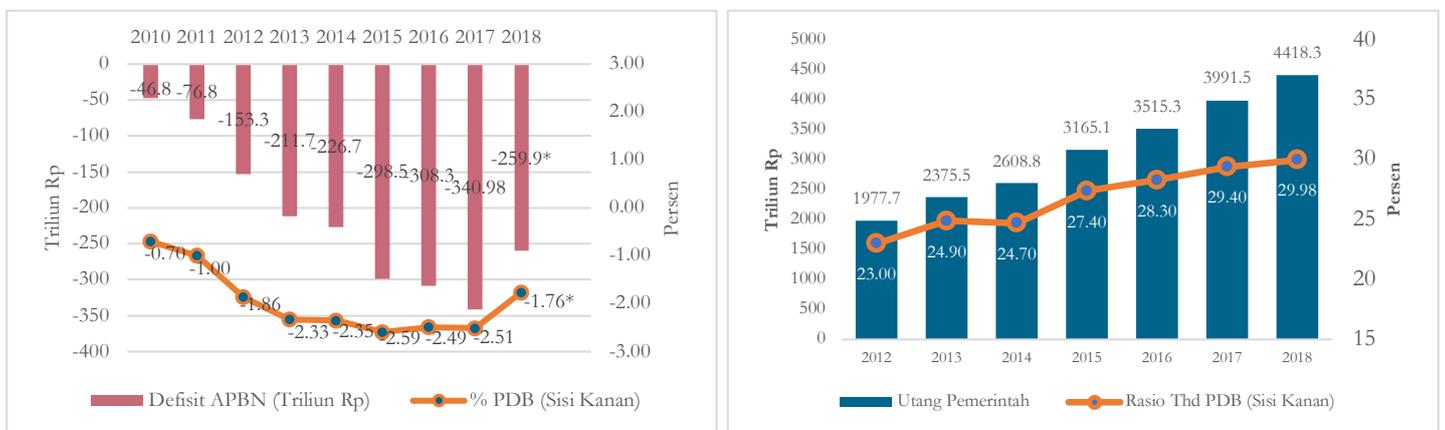
dan sertifikasi meningkat. Hal ini penting untuk meningkatkan relevansi keterampilan calon tenaga kerja di industri yang berkembang.



sumber: Kemenkeu (2018)

Gambar 2.9. Alokasi Anggaran Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Dalam aspek pengelolaan APBN, rasio defisit APBN terhadap PDB berada pada titik terendah 1,76 persen pada 2018 (Gambar 2.10 (a)). Secara nominal utang pemerintah meningkat namun secara proporsi berada di bawah target 30 persen dari PDB (Gambar 2.10(b)). Jika pemerintah dapat secara disiplin menjaga defisit APBN dan proporsi utang di level yang ditargetkan, maka potensi tekanan pada rupiah semakin kecil, kecuali yang datang dari sumber peningkatan permintaan pemerintah pada barang dan jasa luar negeri.



* Angka sementara
sumber: Kemenkeu (2018)

Gambar 2.10. (a) Profil Defisit APBN dan (b) Profil Utang Pemerintah

Penutup

Dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara, maka fluktuasi nilai tukar tidak dapat dihindari karena pengaruh berbagai faktor mulai dari kinerja sektor riil, perubahan di pasar keuangan hingga perubahan kebijakan makro ekonomi mitra dagang utama. Namun di sisi lain, kestabilan nilai tukar sangat diperlukan, baik dalam konteks manajemen makro ekonomi maupun mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan industri di tanah air.

Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, nilai tukar rupiah bisa berkurang volatilitasnya jika didukung oleh beberapa langkah ekonomi seperti disiplin anggaran pemerintah. Berbagai penelitian memperlihatkan jatuhnya mata uang suatu negara disebabkan langkah tidak bijak dari pemerintah untuk terus melakukan ekspansi fiskal di tengah mata uang domestik yang *overvalued* dibandingkan mata uang lainnya.

Langkah penting lain yang harus diambil dalam menjaga volatilitas nilai tukar adalah dengan cara memperbaiki neraca transaksi berjalan. Kebijakan reformasi struktural harus dijalankan untuk memfasilitasi berkembangnya industri manufaktur dengan nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Sektor jasa seperti pariwisata harus dipenuhi dengan terobosan agar mampu menarik wisatawan asing lebih banyak sehingga devisa terus meningkat. Pada sisi impor, pengurangan impor terutama dalam bahan baku dapat dikurangi dengan mendorong industri untuk berinvestasi di sektor hulu, selama sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif. Ini berarti fasilitas fiskal untuk industri, peningkatan kualitas SDM hingga perbaikan kemudahan berusaha harus terus dijalankan secara terukur oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Agenor, P.-R., Bhandari, J. S., & Flood, R. P. (1992). Speculative Attacks and Models of Balance of Payments Crises. *Staff Papers - International Monetary Fund*, 39(2), 357. <https://doi.org/10.2307/3867063>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Export and Import Statistics*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Produk Domestik Bruto*. Jakarta
- Bank Indonesia. *Neraca Pembayaran Indonesia*. Jakarta. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/neraca-pembayaran/Default.aspx>
- Bloomberg. (2018). *Argentine's currency*. <https://www.bloomberg.com/quote/USDARS:CUR>
- Bloomberg. (2018). *Indonesia's currency*. <https://www.bloomberg.com/quote/USDIDR:CUR>
- Bloomberg. (2018). *Thailand's currency*. <https://www.bloomberg.com/quote/USDTHB:CUR>
- Bloomberg. (2018). *Turkey's currency*. <https://www.bloomberg.com/quote/USDTRY:CUR>
- Burnside, C., Eichenbaum, M., & Rebelo, S. (2001). Hedging and financial fragility in fixed exchange rate regimes. *European Economic Review*, 45(7), 1151–1193. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00090-3](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00090-3)
- Chui, M. K. F. (2003). *Leading Indicators of Balance-of-Payments Crises: A Partial Review* (No. 171). *Bank of England Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.392302>
- Feridun, M. (2009). *Determinants of Exchange Market Pressure in Turkey: An Econometric Investigation*. *Emerging Markets Finance and Trade* (Vol. 45). Routledge. <https://doi.org/10.2753/REE1540-496X450204>
- Ford, J., Santoso, B., & Horsewood, N. (2007). *Asian Currency Crises: Do Fundamentals Still Matter?: a Markov-switching Approach to Causes and Timing*. Retrieved from <ftp://5284.bham.ac.uk/pub/rtest/pdf/PAPER7.pdf>
- Gunawan, A. (2018). *Indonesia's Economic Outlook 2018-2019 and Challenges*. Jakarta.
- Heriqbaldi, U., Widodo, W., Ekowati, D. (2018). *real exchange rate misalignment and currency crisis*. Surabaya: unpublished report.
- Heriqbaldi, U., Ismail, M., Kaluge, D., & Santoso, D. B. (2014). A regime switching analysis of Indonesia's exchange market pressure. *Singapore Economic Review*, 59(2). <https://doi.org/10.1142/S0217590814500131>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta
- Kemneterian Keungan. (2018). *Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial*. Jakarta
- Krugman, P. (1979). A Model of Balance-of-Payments Crises. *Journal of Money, Credit and Banking*, 11(3), 311. <https://doi.org/10.2307/1991793>
- Ministry of Finance. (2018). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018*. Jakarta
- Sachs, J., Tornell, A., & Velasco, A. (1996). *Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995*. Cambridge, MA. <https://doi.org/10.3386/w5576>
- Tradingeconomics. (2018). *Indonesia's Current Account Deficit*. <https://tradingeconomics.com/indonesia/current-account-to-gdp>
- Tradingeconomics. (2018). *United State Fed Funds Rate*. <https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate>

World Bank. (2018) *Economy Profile of Indonesia: Doing business 2019 Indicators*.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/719561541103082332/pdf/131701-WP-DB2019-PUBLIC-Indonesia.pdf>

World Integrated Trade Solution. (2018). *Indonesia Trade at A Glance*.
<https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IDN>

KONTRIBUTOR

AHMAD ERANI YUSTIKA



Lahir di Ponorogo. Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya pada tahun 1996. Aktif mempublikasikan tulisan diberbagai media massa (sekitar 650 artikel telah diterbitkan di koran/majalah nasional) dan jurnal ilmiah. Di samping itu, telah mempresentasikan paper dalam forum-forum seminar nasional maupun internasional. Pada 2001 menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D), semuanya di University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen), Jerman (melalui beasiswa GTZ dan DAAD), dengan spesialisasi Ekonomi Kelembagaan.

Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana

Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya (2007-2009) dan Pembantu Dekan I (Akademik) pada 2009 – 2010. Di luar itu, mulai 2008 – saat ini mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Jakarta. Sejak 2010-2017 menjadi Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), serta menjadi Ketua Focus Group Infrastruktur Pengurus Pusat ISEI (2012-2015).

Pada 2006 dan 2009 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I Universitas Brawijaya (dan dosen berprestasi tingkat nasional) dan 2007 terpilih sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya. Mulai 1 Juni 2010 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada 2015 – 2017 menjadi Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 2017-2018 menjadi Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sejak Mei 2018 sampai sekarang menjadi Staf Khusus Presiden bidang ekonomi.

UNGGUL HERIQBALDI



Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di FE Universitas Gadjah Mada tahun 1997. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Monash University (2002) dan Universitas Brawijaya (2012). Sejak tahun 2000 bergabung sebagai dosen dan peneliti di FE Universitas Airlangga, Surabaya dengan spesialisasi bidang ekonomi internasional. Beberapa pengalaman penelitian dan konsultasi bersama dengan mitra seperti Bank Dunia, USAID dan institusi lainnya. Pengalaman terakhir sebagai senior economic advisor pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2018).

MOHAMMAD REZA HAFIZ AKBAR



menyelesaikan studi sarjananya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (2009-2013). Pada saat menjadi mahasiswa, Reza aktif di BEM Fakultas Ekonomi dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sejak 2014 hingga sekarang menjadi peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

MUTIARA ALAM ADDINI



Pekerja profesional di bidang ekonomi pembangunan dengan pengalaman di bidang advisory, manajemen proyek dan riset impact evaluation di Asia Tenggara. Pengalaman riset mencakup bidang pengembangan UMKM, ekonomi pembangunan, pertanian, dan intervensi sanitasi; serta memiliki pengalaman bekerja tidak hanya di Indonesia, namun juga Amerika Serikat dan Kamboja. Sebelumnya bekerja sebagai Research Associate di Center of Education and the Workforce di Georgetown University, Graduate Fellow di Causal Design Cambodia serta Staf SMIDeP-JICA Indonesia. Mutiara juga merupakan Social Innovation Fellow di StartingBloc, Amerika Serikat.

Menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of International Development Policy dari Georgetown University, Amerika Serikat.

ABDUL MANAP PULUNGAN



Abdul Manap Pulungan, dilahirkan di Padangsidempuan, 27 Juli 1984. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2006 dan Magister Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) di Universitas Indonesia tahun 2014. Sejak 2008 hingga kini bergabung di Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Sejumlah tulisan telah dipublikasi di media cetak seperti Investor Daily, Bisnis Indonesia, Koran Kontan, the Jakarta Post, Media Indonesia, dan Republika.

ANA FITROTUL MU'AROFAH



menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2015 dan pascasarjana di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia tahun 2018. Sebelumnya bergabung sebagai Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Saat ini bekerja sebagai Dosen Ekonomi di UIN Walisongo Semarang.

DITA NURUL AINI



Menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan pada 2011 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2015. Berpengalaman menjadi asisten dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang sampai 2016. Selain itu juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai 2018. Saat ini aktif sebagai Tenaga Pengajar Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional Jakarta dan juga peneliti pada lembaga penelitian ECORIST Malang dan INSTEP Jakarta.

DWINDA RAHMAN



Dwindi Rahman. Asal Padang, Sumatera Barat. Menamatkan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Jurusan Akuntansi tahun 2013.

Sejak jadi mahasiswa aktif dalam kegiatan intra dan ekstra kampus. Pernah bekerja di KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International).

Setelah itu, bekerja menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi. Beberapa tulisan telah diterbitkan di media cetak atau online.

RIYANDI SARAS ANGGITA



Riyandi Saras Anggita, menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2015 dan pascasarjana pada bidang Economics and Econometrics di University of Nottingham tahun 2017. Sebelumnya bergabung sebagai Tenaga Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

FAJAR B. HIRAWAN



Saat ini aktif sebagai Faculty Member di Sekolah Kepemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia (School of Government and Public Policy (SGPP)). Selain itu, aktif berkarya sebagai Peneliti di Departemen Ekonomi, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Indonesia, sejak November 2006. memiliki banyak pengalaman penelitian dan mengajar, khususnya terkait topik yang berhubungan dengan ekonomi makro, ketahanan pangan, digital ekonomi, UMKM, dan isu pembangunan ekonomi lainnya di Indonesia.

Menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di tahun 2006 dan studi S2 di bidang Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas di Roma "La Sapienza," Italia di tahun 2009. Fajar memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi di School of Economics, University of Sydney, Australia di tahun 2017.

DHENNY YUARTHA JUNIFTA



Alumnus universitas Brawijaya. Sejak Mahasiswa, dhenny telah aktif di dunia riset dan organisasi. Mantan Sekretaris Umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI) komisariat ekonomi dan bisnis, pernah menjadi asisten peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK) FEB-UB di tahun 2009. Memenangi beberapa penghargaan riset di level nasional. Spesialisasi dan minat dalam ekonomi politik internasional. Menyusun tugas akhir dengan judul "Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Upaya Integrasi Ekonomi Asia Pasifik dan kompetisi Negara Hegemon ekonomi".

Pada akhir Tahun 2016, bergabung menjadi asisten peneliti di Institute for Development of economics and Finance (INDEF), dan peneliti muda hingga kini. Selain aktif di INDEF, tahun 2017-2018 pernah bertugas di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Sejak 2018 hingga sekarang aktif sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden. Aktif menulis artikel di media masa regional maupun nasional.

YUNA FARHAN



Menyelesaikan studi doktoralnya di University of Sydney dengan tema disertasi “Politik Anggaran di Indonesia”. Sebelumnya bergabung dengan Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) sejak tahun 2001 dan menjadi Sekjen FITRA tahun 2008-2013. Saat ini bekerja sebagai Country Manager Indonesia di International Budget Partnership.

MUHAMMAD MAULANA



Meraih gelar Master of Public Policy dari Flinders University – Australia pada 2016 dengan thesis berjudul ‘Politik Penganggaran Kesehatan di Indonesia’. Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Cabang Australia Selatan periode 2015-2016. Peneliti kebijakan dan tata kelola anggaran publik sejak 2007 hingga 2014 di Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Pada 2018, bersama sejumlah pegiat aktiois anggaran mendirikan Perkumpulan Policy Reform Initiatives and Democracy (PRIDe).